



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : \${nomor naskah} Jakarta, \${tanggal naskah}
Sifat : Penting
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Lokakarya Identifikasi *Key Performance Indicator* (KPI) Untuk Instrumen
Pendanaan Biru dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan
Kabupaten Raja Ampat

Yth. Mohon Merujuk Daftar Terlampir
di Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Kajian Kerangka Kerja Pemantauan dan Pelaporan
Pendanaan Biru sebagai bagian dari implementasi Komponen 3 Hibah Oceans for Prosperity
Project–LAUTRA yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memvalidasi *Key Performance
Indicators* (KPI) serta mengumpulkan data *baseline* untuk mendukung penyusunan instrumen
pendanaan biru, bersama ini kami mengundang Saudara/i pada:

hari, tanggal : Senin, 24 Agustus 2026
waktu : 09.00 WIT – selesai
tempat : Hotel Swiss-Belhotel Sorong
Jl. Jend. Sudirman, Malawei, Kecamatan Sorong Manoi, Kota
Sorong
pemimpin rapat : Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian
PPN/Bappenas
agenda : sebagaimana terlampir

Sehubungan dengan kegiatan tersebut, kami harap Saudara/i hadir atau menugaskan 1
(satu) orang pegawai yang membidangi fungsi terkait untuk berpartisipasi dan mengikuti
kegiatan secara penuh. Kegiatan akan dilakukan secara paralel ruang A untuk Pemerintah
Provinsi, ruang B untuk Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan mitra NGO.

Biaya keikutsertaan akan dibebankan pada anggaran Hibah Oceans for Prosperity
Project–LAUTRA Komponen 3. Kami harap Saudara/i menyampaikan konfirmasi kehadiran
paling lambat pada hari Jumat, 21 Agustus 2026 pukul 16.00 WIT melalui tautan
https://bit.ly/LokakaryaMR_PBD. Untuk informasi dan konfirmasi lebih lanjut, kami
menugaskan Sdr. Dimastya Baskara (+62 877-4839-6623) sebagai narahubung.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Saudara/i.

Sekretaris Deputi Bidang Pangan,
Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup,

\${ttd_pengirim}
Puspita Suryaningtyas

Tembusan:

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Lampiran I Surat Undangan

Nomor : \${nomor naskah}

Tanggal : \${tanggal naskah}

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI PENERIMA UNDANGAN

Hadir Luring

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

1. Dr. Ir. Gelwynn Jusuf, M.Sc, Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM, Perencana Ahli Utama, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
3. Direktur Kelautan dan Perikanan
4. Direktur Pembiayaan dan Hibah Luar Negeri
5. Direktur Eksekutif Indonesia Climate Change Trust Fund/ICCTF
6. PPK Program XIV/Satker MWA ICCTF
7. Pegawai lingkup Sekretariat Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
8. Pegawai lingkup Direktorat Kelautan dan Perikanan
9. Pegawai lingkup Sekretariat Indonesia Climate Change Trust Fund/ICCTF
10. Project Implementing Unit (PIU) Hibah Oceans for Prosperity Project-LAUTRA

Kementerian Kelautan dan Perikanan

11. Koordinator Satpel Sorong, Balai Pengelolaan Kelautan Kupang
12. Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong

Pemerintah Daerah

13. Kepala Bapperida Provinsi Papua Barat Daya
14. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya
15. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Papua Barat Daya
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya
17. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya
18. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya
19. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Papua Barat Daya
20. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat Daya
21. Kepala Bappeda Kabupaten Raja Ampat
22. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat
23. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat
24. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat
25. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat
26. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat
27. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Raja Ampat

Pengelola Kawasan Konservasi Daerah Misool

28. BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat

Lembaga Keuangan Daerah

29. Pemimpin Bank Papua Kantor Cabang Utama (KCU) Sorong
30. Kepala Kantor Cabang Bank Mandiri Sorong

NGO

31. Ketua Misool Foundation
32. Koordinator Yayasan Konservasi Alam Nusantara Kantor Program Sorong
33. Direktur Eksekutif Elasmobranch Institute Indonesia
34. Ketua Yayasan Terangi

Hadir Daring (Meeting ID: 559 758 8897 | Passcode: lautra)

Akademisi dan Masyarakat

- 35. Kepala Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Papua
- 36. Dr. Toni Ruchimat, Pemerhati Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan
- 37. Agus Dermawan, M.Si, Pemerhati Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir
- 38. Ir. Matheus Eko Rudianto, Ahli Perencana Kebijakan Sumber Daya Kelautan

Catatan:

Sesuai dengan desain Ocean for Prosperity Project-LAUTRA, kegiatan ini diharapkan melibatkan minimal 30% perempuan dalam kegiatannya. Kegiatan ini terbuka bagi penyandang disabilitas.

Sekretaris Deputi Bidang Pangan,
Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup,

\$(ttd_pengirim)

Puspita Suryaningtyas

Lampiran II Surat Undangan

Nomor : \${nomor naskah}

Tanggal : \${tanggal naskah}

**AGENDA LOKAKARYA IDENTIFIKASI *KEY PERFORMANCE INDICATORS*
UNTUK INSTRUMEN PENDANAAN BIRU DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DAN KABUPATEN RAJA AMPAT
SENIN, 24 AGUSTUS 2026**

Waktu (WIT)	Kegiatan
Ruang A	
08.00 – 09.00	Registrasi Peserta
09.00 – 09.10	Pembukaan Direktorat Kelautan dan Perikanan – Kementerian PPN/Bappenas
09.10 – 09.20	Sambutan Kepala Bapperida Provinsi Papua Barat Daya
09.20 – 09.30	Penjelasan Tujuan Lokakarya Dr. Liliek Sofitri, S.E., M.A., CertDA, <i>Team Leader Monitoring and Reporting Framework, Proyek LAUTRA</i>
09.30 – 10.45	Sesi 1: Kebijakan, Perikanan Tangkap dan Budi Daya, Konservasi di Provinsi Papua Barat Daya - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya Investasi, Pembiayaan, dan Landscape Usaha UMKM di Provinsi Papua Barat Daya - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat Daya - Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Papua Barat Daya - Pemimpin Bank Papua KCU Sorong - Kepala Kantor Cabang Bank Mandiri Sorong
10.45 – 12.30	Diskusi dan Tanya Jawab
12.30 – 13.30	ISHOMA
13.30 – 15.00	Diskusi dipimpin oleh Supangkat Job, ST., M.Si, <i>Team Member Monitoring and Reporting Framework, Proyek LAUTRA</i> Sesi 2: Pariwisata, Energi dan Pengelolaan Lingkungan di Provinsi Papua Barat Daya - Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Papua Barat Daya - Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya - Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya Data dan Riset terkait Ekonomi Biru di Provinsi Papua Barat Daya - Kepala Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Papua - Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong
15.00 – 16.45	Diskusi dan Tanya Jawab

16.45 – 17.00	Kesimpulan dan Penutupan <i>Team Member Monitoring and Reporting Framework, Proyek LAUTRA</i>
Ruang B	
08.00 – 09.20	Registrasi Peserta
09.20 – 09.30	Penjelasan Tujuan Lokakarya <i>Supangkat Job, ST., M.Si, Team Member Monitoring and Reporting Framework, Proyek LAUTRA</i>
09.30 – 10.30	Sesi 1: NGO Sharing Session <i>community-based conservation, ecosystem monitoring, and sustainable tourism</i> 1. Ketua Misool Foundation 2. Koordinator Yayasan Konservasi Alam Nusantara Kantor Program Sorong 3. Direktur Eksekutif Elasmobranch Institute Indonesia 4. Koordinator Yayasan Terangi
10.30 – 12.00	Diskusi dan Tanya Jawab
12.00 – 13.15	ISHOMA dan Registrasi Peserta Sesi Siang
13.15 – 13.30	Pembukaan Direktur Kelautan dan Perikanan – Bappenas
13.30 – 13.40	Penjelasan Tujuan Lokakarya <i>Dr. Liliek Sofitri, S.E., M.A., CertDA, Team Leader Monitoring and Reporting Framework, Proyek LAUTRA</i>
13.40 – 14.55	Sesi 2: Kebijakan, Perikanan Tangkap dan Budi Daya, serta Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Lingkungan 1. Kepala Bappeda Kabupaten Raja Ampat 2. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat 3. BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat 4. Koordinator Satpel Sorong, Balai Pengelolaan Kelautan Kupang 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat
14.55 – 15.55	Sesi 3: Pariwisata, Investasi, UMKM, Transportasi 1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat 2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat 4. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Raja Ampat
15.55 – 16.45	Diskusi dan Tanya Jawab
16.45 – 17.00	Kesimpulan dan Penutupan <i>Team Leader Monitoring and Reporting Framework, Proyek LAUTRA</i>

Sekretaris Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup,

\$_{ttd_pengirim}\$

Puspita Suryaningtyas

Lampiran III Surat Undangan

Nomor : \${nomor naskah}

Tanggal : \${tanggal naskah}

KERANGKA ACUAN KERJA LOKAKARYA IDENTIFIKASI *KEY PERFORMANCE INDICATORS* UNTUK INSTRUMEN PENDANAAN BIRU DENGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DAN KABUPATEN RAJA AMPAT

A. Latar Belakang

Untuk mempertahankan Kawasan Konservasi Laut dan ketahanan masyarakat pesisir, diperlukan peningkatan akses terhadap pendanaan biru, khususnya yang ditujukan untuk: (i) investasi operasional dan modal Kawasan Konservasi Laut, (ii) infrastruktur untuk mendukung mata pencaharian pesisir dan rantai nilai, serta (iii) akses ke layanan keuangan bagi UMKM pesisir. Mobilisasi pembiayaan biru sangat penting karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) terbatas dari pendanaan yang diperlukan untuk mencapai target sektor kelautan dan perikanan, termasuk pendanaan pengelolaan kawasan konservasi perairan. Indonesia saat ini menjadi pasar investasi terbesar di Asia Tenggara baik dari segi modal yang disalurkan maupun jumlah transaksi, yang memfasilitasi potensi akses ke pasar pembiayaan biru.

Salah satu elemen inti dari pembiayaan Blue Bond adalah Kerangka Kerja Monitoring dan Pelaporan (*Monitoring and Reporting Framework/MRF*). Penyusunan MRF bertujuan melengkapi instrumen pembiayaan biru agar memenuhi standar internasional (*ICMA Green Bond Principles, IFC Guidelines for Blue Finance*) maupun kerangka nasional, serta memberi kepercayaan kepada investor, baik untuk penerbitan oleh Pemerintah (*sovereign*) maupun untuk penerbitan Korporasi Swasta /BUMN/BUMD/ (*non-sovereign*).

Pada Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia, Bappenas telah menyusun ekonomi biru Indonesia ke dalam delapan klaster sektor ekonomi. Sektor ini terdiri dari empat sektor ekonomi yang sudah mapan dan terus didorong pertumbuhannya yaitu Perikanan Tangkap dan Budi Daya, Industri Berbasis Kelautan, Perdagangan-Transportasi-Logistik Maritim, serta Pariwisata Bahari. Empat klaster lainnya adalah sektor baru yang diproyeksikan menjadi sumber pertumbuhan masa depan - Energi Terbarukan Berbasis Laut, Bioteknologi-Bioekonomi Laut, Riset dan Pendidikan, serta Konservasi Laut dan Pengelolaan Jasa Ekosistem Berkelanjutan.

Dalam kerangka besar ekonomi biru, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki peran sentral sebagai kementerian teknis sekaligus wali data utama. Dari delapan klaster sektor ekonomi biru, KKP paling tidak terlibat di lima klaster ekonomi biru. Kegiatan ini termasuk Komponen 3 Program LAUTRA (*Sustainable Financing for Marine Protected Area and Livelihoods*) yang didukung Hibah Pro-Blue World Bank.

Proses penyusunan Teori Perubahan (*Theory of Change*) untuk seluruh klaster ekonomi biru pada tahap desk study menunjukkan bahwa sebagian besar Output KPI sudah memiliki kerangka indikator dan formula yang jelas, namun sejumlah kekosongan dan ketidakjelasan penting masih memerlukan verifikasi dan pengisian langsung di tingkat provinsi, kabupaten, dan tapak.

Rangkaian kunjungan lapangan ini dirancang untuk menjangkau tiga lapis pemangku kepentingan yang tidak dapat dijangkau lewat forum di Jakarta: 1) pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Kabupaten Raja Ampat untuk isu data sosial-ekonomi, kewenangan institusional, dan infrastruktur; 2) lembaga keuangan daerah Bank (Papua, Mandiri) dan asosiasi/koperasi UMKM sektor kelautan untuk isu kesiapan penyaluran dana dan validasi

kebutuhan riil pelaku usaha; serta 3) BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat Misool dan mitra konservasi (Misool Foundation, YKAN, Elasmobranch Institute, Yayasan Terangi) untuk verifikasi kondisi ekosistem dan data tapak di kawasan Misool.

B. Tujuan

Tujuan dari lokakarya ini adalah:

1. Mengidentifikasi *Key Performance Indicator* untuk instrumen pendanaan biru
2. Menyelaraskan data sosial-ekonomi, investasi, dan infrastruktur tingkat provinsi/kabupaten dengan kerangka KPI dan kerangka M&R pendanaan biru
3. Menguji kesiapan Bank Papua, Mandiri, dan asosiasi/koperasi UMKM sektor kelautan sebagai jalur penyaluran pendanaan biru (*sovereign* atau *non-sovereign bond*) di wilayah kerja Papua Barat Daya
4. Mengumpulkan data *monitoring* dan pengalaman NGO mengenai konservasi, restorasi, wisata berkelanjutan, pelibatan masyarakat, serta kebutuhan pembiayaan
5. Menentukan indikator prioritas dan baselinenya untuk kerangka M&R pendanaan biru

C. Keluaran

1. Validasi *Key Performance Indicator* untuk instrumen pendanaan biru
2. Pemetaan penggalan informasi lanskap usaha dan potensi *revenue* di Provinsi Papua Barat Daya dan Kabupaten Raja Ampat
3. Pemetaan kesiapan Bank Papua, Mandiri, dan asosiasi/koperasi UMKM sebagai jalur penyaluran dana *sovereign* atau *non-sovereign bond*
4. Ringkasan data dan pengalaman Misool Foundation, YKAN, Elasmobranch Institute Indonesia, Yayasan Terangi
5. Laporan kegiatan rangkaian kunjungan lapangan

D. Pembiayaan

Pembiayaan bersumber dari hibah Proyek LAUTRA pada Satuan Kerja Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF, DIPA Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Tahun Anggaran 2026.

Sekretaris Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya
Alam, dan Lingkungan Hidup,

\$(ttd_pengirim)

Puspita Suryaningtyas

Lampiran IV Surat Undangan

Nomor : \${nomor naskah}

Tanggal : \${tanggal naskah}

FOKUS PAPARAN NARASUMBER

Setiap narasumber memperoleh waktu paparan maksimal 10 menit. Paparan diminta langsung menyajikan angka, tabel, peta, program/proyek, sumber data, dan dokumen pendukung sesuai fokus berikut.

Sesi	Narasumber	Fokus Paparan
Ruang A		
Sesi 1 15 menit	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya	Perikanan Tangkap dan Budi Daya a. Armada tangkap menurut kategori GT, jumlah nelayan kecil, wilayah operasi, dan alat tangkap utama. b. Adopsi e-PIT, VMS/SPKP, tingkat kepatuhan, serta kendala penerapan di tingkat nelayan dan armada. c. Komposisi budi daya laut, payau, dan tawar; komoditas utama; hatchery/BBI/BBIP; serta investasi akuakultur yang berjalan atau direncanakan. d. Daftar lengkap kawasan konservasi di Papua Barat Daya dan status kewenangan masing-masing kawasan. e. Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI), status Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), fasilitas rantai dingin, galangan kapal, serta unit UPTD/BLUD yang relevan. f. Program/proyek prioritas sektor perikanan dan budi daya yang siap ditindaklanjuti, termasuk lokasi, kebutuhan biaya, penerima manfaat, dan indikator.

Sesi	Narasumber	Fokus Paparan
Sesi 1 15 menit	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat Daya	Investasi dan Lanskap Usaha Ekonomi Biru - Jumlah unit usaha terdaftar menurut klaster ekonomi biru, KBLI, lokasi, dan skala mikro, kecil, menengah, atau besar. - Nilai dan komposisi investasi PMA/PMDN yang terkait perikanan, budi daya, pengolahan, pariwisata, transportasi, energi, dan layanan lingkungan. - Perbedaan antara usaha yang sudah beroperasi dan menghasilkan revenue dengan usaha yang masih pada tahap izin, konstruksi, atau persiapan. - Rencana ekspansi investor dalam satu sampai tiga tahun, kebutuhan pembiayaan, lokasi, nilai investasi, serta perkiraan tenaga kerja. - Status perizinan utama dan hambatan regulasi, termasuk keterkaitan dengan ruang laut, lingkungan, bangunan, dan kewenangan lintas-instansi. Daftar awal usaha/proyek yang paling siap dipertimbangkan dalam <i>pipeline</i> pembiayaan ekonomi biru.
Sesi 1 15 menit	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya	Lanskap UMKM, Legalitas, dan Kebutuhan Pengembangan Usaha - Jumlah koperasi dan UMKM aktif yang terkait perikanan, budi daya, pengolahan, pariwisata, transportasi, kuliner, kerajinan, dan layanan lingkungan. - Sebaran usaha menurut lokasi, skala, legalitas/NIB, keanggotaan, status operasi, dan keterlibatan perempuan serta pemuda. - Program bantuan, pelatihan, hibah, peralatan, KUR, dan pembiayaan yang telah diterima untuk mencegah klaim ganda. - Kendala utama UMKM: bahan baku, kualitas, izin, teknologi, kemasan, pasar, transportasi, energi, air, sampah, dan modal. - Kebutuhan investasi dan modal kerja, rencana ekspansi, serta kesiapan pembukuan dan data usaha. - Kesiapan koperasi/UMKM menjadi penerima manfaat, agregator, atau responden baseline dan pelaporan berkala.

Sesi	Narasumber	Fokus Paparan
Sesi 1 15 menit	Pemimpin Bank Papua Kantor Cabang Utama (KCU) Sorong	Pembiayaan Sektor Kelautan dan Potensi Kemitraan - Jumlah dan nilai pembiayaan berjalan secara agregat untuk nelayan, pembudidaya, pengolah hasil laut, UMKM wisata, transportasi, dan usaha pendukung. - Sebaran pembiayaan menurut kabupaten/kecamatan, sektor, skala usaha, jenis akad/produk, tenor, dan tujuan penggunaan dana. - Kualitas pembayaran secara agregat, kendala <i>bankability</i>, kebutuhan agunan, laporan keuangan, legalitas, dan risiko musim usaha. - Produk pembiayaan yang paling sesuai untuk modal kerja, investasi aset, rantai pasok, kapal, pengolahan, pariwisata, dan UMKM. - Kemungkinan berbagi data agregat/anonim untuk baseline, rekonsiliasi penerima manfaat, dan pelaporan dampak. - Minat dan kesiapan sebagai mitra penyalur, <i>co-financier</i>, <i>collection bank</i>, <i>escrow bank</i>, atau bagian dari skema <i>blended finance/Blue Bond</i>.
Sesi 1 15 menit	Kepala Kantor Bank Mandiri Cabang Sorong	KUR dan Pembiayaan Mikro untuk Ekonomi Biru - Jumlah dan nilai agregat KUR Mikro/Kecil untuk nelayan, pembudidaya, UPI, UMKM wisata, perdagangan, transportasi, dan usaha pendukung, khususnya di Papua Barat Daya. - Sebaran penerima pembiayaan menurut kecamatan dan sektor serta mekanisme anonimisasi data untuk kebutuhan baseline. - Kualitas portofolio secara agregat, pola pembayaran, kendala umum, dan risiko yang dipengaruhi musim, cuaca, atau pasar. - Kriteria kelayakan usaha, persyaratan administrasi, agunan, tenor, <i>grace-period</i>, serta kebutuhan pendampingan calon debitur. - Potensi pembiayaan rantai pasok, pembelian aset produktif, digitalisasi transaksi, dan kemitraan dengan koperasi/asosiasi. - Kemungkinan peran Mandiri sebagai mitra penyalur, pembayaran, escrow/collection bank, atau penyedia pembiayaan pendamping.

Sesi	Narasumber	Fokus Paparan
Sesi 2 15 menit	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya	Pariwisata Bahari Papua Barat Daya - Mekanisme pendataan kunjungan wisatawan di destinasi pariwisata bahari, definisi pengunjung, periode, sumber, serta rekonsiliasi dengan data pengelola kawasan dan pemerintah kabupaten. - Jumlah resort, hotel, homestay, kamar, dive center, operator wisata/kapal, pemandu, usaha kuliner, dan usaha pendukung yang aktif. - Okupansi, lama tinggal, pola musim, pengeluaran wisatawan, tenaga kerja lokal, dan kontribusi usaha terhadap ekonomi daerah. - Rencana pengembangan destinasi, investasi baru, yacht/cruise tourism, status CIQP, KSPN, dan konektivitas dengan destinasi lain. - Daya dukung, kepadatan wisata, keselamatan, kualitas layanan, kebutuhan SDM, dan risiko terhadap lingkungan kawasan. - Proyek/investasi pariwisata bahari yang siap dikembangkan berikut kebutuhan biaya, izin, sumber <i>revenue</i>, dan indikator dampaknya.
Sesi 2 15 menit	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Papua Barat Daya	Energi Terbarukan dan Keandalan Energi Pulau Kecil - Status elektrifikasi Kawasan Konservasi Daerah dan pulau kecil: kapasitas terpasang, sumber energi, jam layanan, jumlah pelanggan, biaya, dan gangguan. - Pemanfaatan PLTS, baterai/energy storage, mikrogrid, genset, serta peluang efisiensi energi untuk usaha dan layanan publik. - Rencana proyek energi laut, angin, surya, atau teknologi lain; status studi, lokasi, kapasitas, biaya, dan kesiapan. - Power Purchase Agreement (PPA) yang sudah atau akan berjalan dan potensi <i>revenue</i> dari penjualan listrik. - Status perizinan dan koordinasi PKKPR untuk proyek energi yang menggunakan atau bersinggungan dengan ruang laut. - Kebutuhan investasi energi prioritas untuk mendukung pariwisata, air, sampah, transportasi, dan kegiatan ekonomi di Kawasan Konservasi Daerah.

Sesi	Narasumber	Fokus Paparan
Sesi 2 15 menit	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya	Transportasi, Pelabuhan, dan Logistik Pulau Kecil - Status kewenangan pelabuhan umum, pelabuhan lokal, dan dermaga yang mendukung akses konektivitas. - Rute, frekuensi, kapasitas, tarif, jumlah penumpang, volume barang, waktu tempuh, dan gangguan pelayanan menurut musim. - Keselamatan kapal, manifest, standar operator, kesiapan sarana penyelamatan, dan pencatatan insiden. - Rute distribusi/tol laut atau layanan logistik yang sudah dan belum melayani pulau kecil, termasuk kebutuhan rantai dingin. - Status CIQP dan implikasinya bagi yacht/cruise tourism serta konektivitas internasional. - Proyek transportasi/logistik prioritas, estimasi biaya, operator, sumber <i>revenue</i>, izin, dan kebutuhan operasi-pemeliharaan.
Sesi 2 15 menit	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya	Pengelolaan Lingkungan, Sampah, Limbah, dan Ekosistem Pesisir - Kondisi dan volume sampah laut/darat di Kawasan Konservasi Daerah, kapasitas pengumpulan, pengangkutan, pemilahan, pengolahan, landfill, serta biaya layanan. - Kondisi air limbah, sanitasi, kualitas air, sumber pencemaran, kepatuhan usaha, hasil uji, dan tindak lanjut pengawasan. - Kepatuhan UPI dan industri kelautan terhadap baku mutu, PROPER atau instrumen pengawasan lain yang tersedia. - Operator layanan, kemungkinan UPTD/BLUD atau kemitraan usaha, sumber pendanaan, tarif/biaya, dan kesenjangan layanan. - Proyek prioritas untuk sampah, air limbah, rehabilitasi, pengendalian pencemaran, dan peningkatan kepatuhan lingkungan.

Sesi	Narasumber	Fokus Paparan
Sesi 2 15 menit	Kepala Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Papua	Riset Akademik, Baseline, dan Kapasitas Monitoring - Temuan penelitian independen mengenai ekologi, stok ikan, terumbu karang, penyu, budi daya, pariwisata, sosial-ekonomi, dan tekanan lingkungan. - Ketersediaan <i>data set</i>, lokasi penelitian, tahun, metode, seri waktu, metadata, serta kemungkinan berbagi data untuk baseline. - Aktivitas riset bioteknologi/bioekonomi kelautan yang benar-benar aktif, fasilitas, produk, mitra, dan kolaborasi dengan BRIN. - Kapasitas universitas untuk mendukung desain sampling, quality assurance, verifikasi independen, <i>citizen science</i>, dan <i>monitoring</i> berkala. - Data penyerapan lulusan, keterampilan yang dibutuhkan industri, serta peluang magang/pelatihan untuk mendukung ekonomi biru. - Dokumentasi pengetahuan tradisional masyarakat pesisir dan peluang integrasinya dalam pengelolaan serta pelaporan.
Sesi 2 15 menit	Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong	Riset Akademik, Baseline, dan Kapasitas Monitoring - Temuan penelitian independen mengenai ekologi, stok ikan, terumbu karang, penyu, budi daya, pariwisata, sosial-ekonomi, dan tekanan lingkungan. - Ketersediaan <i>data set</i>, lokasi penelitian, tahun, metode, seri waktu, metadata, serta kemungkinan berbagi data untuk baseline. - Aktivitas riset bioteknologi/bioekonomi kelautan yang benar-benar aktif, fasilitas, produk, mitra, dan kolaborasi dengan BRIN. - Kapasitas universitas untuk mendukung desain sampling, quality assurance, verifikasi independen, <i>citizen science</i>, dan <i>monitoring</i> berkala. - Data penyerapan lulusan, keterampilan yang dibutuhkan industri, serta peluang magang/pelatihan untuk mendukung ekonomi biru. - Dokumentasi pengetahuan tradisional masyarakat pesisir dan peluang integrasinya dalam pengelolaan serta pelaporan.
Ruang B		

Sesi	Narasumber	Fokus Paparan
Sesi 1 15 menit	Ketua Misool Foundation	Pengelolaan konservasi berbasis kawasan, dampak konservasi, dan pembiayaan berkelanjutan di Misool a. Paparan mencakup model pengelolaan kawasan konservasi; ranger patrol dan pengawasan; perubahan kondisi terumbu karang, biomassa ikan, hiu dan manta; restorasi ekosistem; keterlibatan dan manfaat bagi masyarakat lokal; hubungan konservasi dengan pariwisata; sistem pengumpulan dan pelaporan data. b. Pengalaman pembiayaan: sumber pembiayaan konservasi yang pernah digunakan; kontribusi pariwisata/resort; donor dan filantropi; partnership dengan perusahaan; mekanisme pendanaan untuk ranger, monitoring, restorasi dan <i>community development</i>; biaya tahunan pengelolaan; <i>financing gap</i>; keberlanjutan sumber dana; serta pengalaman menghubungkan pendapatan ekonomi dengan pembiayaan konservasi. c. Rekomendasi indikator M&R untuk efektivitas kawasan, biodiversitas, patroli, manfaat masyarakat, serta <i>conservation financing</i>.
Sesi 1 15 menit	Koordinator Yayasan Konservasi Alam Nusantara Kantor Program Sorong	Perikanan skala kecil, sasi, <i>community-based monitoring, livelihood</i>, dan pembiayaan berbasis masyarakat a. Paparan mencakup kondisi perikanan skala kecil; metode pengumpulan data tangkapan; CPUE, jenis dan ukuran ikan; praktik sasi dan tata kelola berbasis masyarakat adat; keterlibatan perempuan; penguatan kelompok usaha dan livelihood; mekanisme pengumpulan serta QA/QC data masyarakat. b. Pengalaman pembiayaan: pengalaman menggunakan hibah/donor untuk konservasi dan pemberdayaan masyarakat; <i>conservation agreement</i>; dukungan kepada usaha masyarakat; pembiayaan kelompok perempuan; pembiayaan monitoring berbasis masyarakat; mekanisme insentif untuk masyarakat yang menjaga sumber daya; kemungkinan <i>blended finance</i> atau <i>sustainable financing</i> untuk perikanan dan konservasi; <i>exit strategy</i> setelah pendanaan proyek berakhir. c. Rekomendasi indikator M&R untuk perikanan, sasi, livelihood, gender, <i>community-based monitoring</i>, serta keberlanjutan pembiayaan masyarakat.

Sesi	Narasumber	Fokus Paparan
Sesi 1 15 menit	Direktur Eksekutif Elasmobranch Institute Indonesia	Status, monitoring dan perlindungan hiu, pari dan elasmobranch, termasuk kebutuhan pembiayaan konservasi spesies a. Paparan mencakup spesies prioritas; tren populasi dan distribusi; <i>nursery</i>, <i>feeding</i> dan <i>aggregation areas</i>; metode monitoring seperti BRUV, tagging, transek atau <i>photo identification</i>; tekanan penangkapan dan <i>bycatch</i>; perlindungan habitat penting; serta kebutuhan database jangka panjang. b. Pengalaman pembiayaan: sumber pembiayaan penelitian dan monitoring elasmobranch; <i>research grants</i>; donor konservasi; dukungan universitas/lembaga penelitian; <i>corporate partnership</i>; pembiayaan tagging, BRUV, survey dan database; biaya monitoring jangka panjang; keterbatasan pendanaan untuk spesies prioritas; serta potensi pembiayaan <i>melalui tourism-based conservation</i>, <i>citizen science</i> atau kemitraan operator wisata. c. Rekomendasi indikator M&R untuk kelimpahan, populasi, habitat penting, <i>bycatch</i>, efektivitas perlindungan, serta keberlanjutan pembiayaan monitoring elasmobranch.
Sesi 1 15 menit	Ketua Yayasan Terangi	Kesehatan terumbu karang, metodologi monitoring, restorasi, dan pembiayaan pemantauan ekosistem jangka panjang a. Paparan mencakup kondisi dan tren tutupan karang; coral recruitment, bleaching, penyakit dan mortalitas; biomassa dan komunitas ikan karang; metode reef health monitoring; standar sampling dan QA/QC; restorasi terumbu; pengelolaan dan interoperabilitas data. b. Pengalaman pembiayaan: pengalaman pendanaan monitoring dan restorasi terumbu melalui donor, pemerintah, penelitian, perusahaan atau CSR; biaya pelaksanaan reef monitoring; biaya restorasi per lokasi/luasan; pembiayaan survey dan equipment; tantangan menjaga kesinambungan monitoring setelah proyek selesai; peluang pembiayaan melalui tourism fee, operator diving, conservation fund atau skema pembiayaan ekosistem lainnya. c. Rekomendasi indikator M&R untuk reef health, coral cover, fish biomass, restorasi, kualitas data, serta keberlanjutan pembiayaan monitoring terumbu.

Sesi	Narasumber	Fokus Paparan
Sesi 2 15 menit	Kepala Bappeda Kabupaten Raja Ampat	Kebijakan, Perencanaan, dan <i>Pipeline</i> Ekonomi Biru Kabupaten Raja Ampat - Posisi ekonomi biru, perikanan, pariwisata, dan perlindungan ekosistem dalam RPJMD, RKPD, serta program prioritas Kabupaten Raja Ampat. - Pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah pusat, dan Unit Pengelola Kawasan Konservasi Misool. - Daftar program dan proyek yang telah memiliki lokasi, penanggung jawab, kebutuhan biaya, jadwal, indikator, dan sumber pendanaan. - Keterkaitan program kabupaten dengan layanan dasar di Misool, termasuk sampah, air, sanitasi, transportasi, perizinan usaha, dan pemberdayaan masyarakat. - Program yang telah dibiayai APBN, APBD, LAUTRA, hibah, CSR, atau sumber lain untuk mencegah tumpang tindih dan klaim pembiayaan ganda. - Daftar calon proyek/usaha yang paling siap masuk <i>pipeline</i> pembiayaan ekonomi biru dalam satu sampai tiga tahun.
Sesi 2 15 menit	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat	Perikanan, Budi Daya, Pengolahan, dan Rantai Nilai Lokal - Jumlah nelayan, rumah tangga perikanan, kapal, alat tangkap, wilayah operasi, produksi, CPUE, komoditas utama, harga, dan pola musim di Raja Ampat. - Kegiatan budi daya laut, payau, atau tawar; luas, komoditas, produksi, kelompok usaha, fasilitas benih, dan kebutuhan pengembangan. - Jumlah pengepul, pemasok seafood, pengolah hasil perikanan, Unit Pengolahan Ikan, fasilitas es/cold chain, kapasitas, legalitas, dan status SKP. - Rantai pasok hasil perikanan dari nelayan sampai hotel, restoran, pasar, atau pembeli luar daerah; termasuk kehilangan hasil, mutu, dan hambatan logistik. - Program bantuan, KUR, hibah, sarana produksi, pelatihan, dan penerima manfaat yang telah ada, berikut sistem identifikasi penerima untuk mencegah klaim ganda - Calon usaha atau proyek perikanan yang siap dikembangkan, termasuk kebutuhan investasi, lokasi, pelaksana, pasar, indikator, dan rencana operasi.

Sesi	Narasumber	Fokus Paparan
Sesi 2 15 menit	BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat	Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah - Status kelembagaan, mandat, luas kawasan, zonasi, dan pembagian kewenangan pengelolaan kawasan konservasi daerah. - Nilai EVIKA terbaru, tahun penilaian, indikator pembentuk, kemajuan, dan komponen yang masih lemah. - Jumlah personel, sarana patroli, kapal, buoy, pos, alat <i>monitoring</i>, frekuensi patroli, dan sistem pencatatan insiden. - Kondisi terumbu karang, biodiversitas, data penyu sisik, lekang, dan hijau, lokasi <i>monitoring</i>, metode, serta tren terbaru. - Data kunjungan, perizinan pemanfaatan, jumlah dan jenis usaha yang beroperasi, kepatuhan zonasi, serta koordinasi dengan pemerintah daerah lainnya. - Rencana kerja, kebutuhan biaya pengelolaan, sumber pendanaan berjalan, kesenjangan pendanaan, calon proyek, dan potensi tumpang tindih dengan program lain.
Sesi 2 15 menit	Koordinator Satpel Sorong, Balai Pengelolaan Kelautan Kupang	Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional - Status kelembagaan, mandat, luas kawasan, zonasi, dan pembagian kewenangan pengelolaan kawasan konservasi daerah. - Nilai EVIKA terbaru, tahun penilaian, indikator pembentuk, kemajuan, dan komponen yang masih lemah. - Jumlah personel, sarana patroli, kapal, buoy, pos, alat <i>monitoring</i>, frekuensi patroli, dan sistem pencatatan insiden. - Kondisi terumbu karang, biodiversitas, data penyu sisik, lekang, dan hijau, lokasi <i>monitoring</i>, metode, serta tren terbaru. - Data kunjungan, perizinan pemanfaatan, jumlah dan jenis usaha yang beroperasi, kepatuhan zonasi, serta koordinasi dengan pemerintah daerah lainnya. - Rencana kerja, kebutuhan biaya pengelolaan, sumber pendanaan berjalan, kesenjangan pendanaan, calon proyek, dan potensi tumpang tindih dengan program lain.

Sesi	Narasumber	Fokus Paparan
Sesi 2 15 menit	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat	Sampah, Air Limbah, Kualitas Lingkungan, dan Layanan Dasar a. Volume sampah darat dan laut di Misool, sumber utama, kapasitas pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan lokasi pembuangan akhir. b. Kondisi air limbah, sanitasi, kualitas air, sumber pencemaran, kepatuhan usaha, hasil pemantauan, dan tindak lanjut pengawasan. c. Operator layanan, aset, personel, biaya operasi, tarif atau kontribusi pengguna, cakupan layanan, dan kesenjangan kapasitas. d. Koordinasi kabupaten dengan pemerintah provinsi, pengelola kawasan, desa, pelaku usaha, dan mitra lain dalam pengelolaan sampah serta pencemaran. e. Proyek prioritas untuk sampah, air limbah, air bersih, rehabilitasi, pengendalian pencemaran, dan peningkatan kepatuhan lingkungan.
Sesi 3 15 menit	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat	Pariwisata Misool dan Lanskap Usaha Wisata a. Mekanisme pendataan kunjungan wisatawan, definisi pengunjung, periode, sumber data, dan rekonsiliasi dengan data Unit Pengelola Kawasan. b. Jumlah hotel, resort, homestay, kamar, dive center, operator wisata/kapal, pemandu, restoran, dan usaha pendukung yang aktif. c. Okupansi, lama tinggal, pola musim, pengeluaran wisatawan, tenaga kerja lokal, keterlibatan perempuan/pemuda, serta kontribusi usaha terhadap ekonomi kabupaten. d. Daya dukung, kepadatan wisata, keselamatan, kualitas layanan, kebutuhan SDM, dan risiko pariwisata terhadap ekosistem kawasan. e. Rencana pengembangan destinasi dan investasi satu sampai tiga tahun, termasuk lokasi, kebutuhan biaya, izin, sumber <i>revenue</i>, dan indikator dampak.

Sesi	Narasumber	Fokus Paparan
Sesi 3 15 menit	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat	Transportasi, Dermaga, Keselamatan, dan Logistik Raja Ampat - Status kewenangan Pelabuhan di Misool, dermaga Misool, pelabuhan lokal, serta pembagian peran pusat, provinsi, kabupaten, dan operator. - Rute, frekuensi, kapasitas, tarif, jumlah penumpang, volume barang, waktu tempuh, dan gangguan layanan menurut musim atau cuaca. - Keselamatan kapal, manifest, standar operator, fasilitas penyelamatan, pengawasan, pencatatan insiden, dan kebutuhan peningkatan layanan. - Alur distribusi bahan pangan, BBM, air, bahan bangunan, hasil perikanan, sampah, serta kebutuhan rantai dingin antara daratan dan Misool. - Proyek transportasi atau dermaga prioritas, estimasi biaya, operator, sumber <i>revenue</i>, izin, dan kebutuhan operasi-pemeliharaan.
Sesi 3 15 menit	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat	Investasi, Perizinan, dan Daftar Usaha Aktif - Jumlah unit usaha terdaftar di Raja Ampat dan Misool menurut KBLI, jenis usaha, lokasi, dan skala mikro, kecil, menengah, atau besar. - Perbedaan antara usaha yang sudah beroperasi dan menghasilkan <i>revenue</i> dengan usaha yang masih dalam proses izin, konstruksi, atau belum aktif. - Nilai investasi yang telah direalisasikan dan rencana ekspansi investor dalam satu sampai tiga tahun, termasuk kebutuhan tenaga kerja dan infrastruktur. - Status perizinan utama dan hambatan yang berkaitan dengan NIB, ruang laut, lingkungan, bangunan, pariwisata, transportasi, serta kewenangan lintas-instansi. - Daftar awal usaha atau proyek yang paling siap dipertimbangkan dalam <i>pipeline</i> pembiayaan ekonomi biru.

Sesi	Narasumber	Fokus Paparan
Sesi 3 15 menit	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Raja Ampat	Koperasi, UMKM, Legalitas, dan Kebutuhan Pengembangan Usaha - Jumlah koperasi dan UMKM aktif yang terkait perikanan, pengolahan, pariwisata, transportasi, kuliner, kerajinan, pemasok, sampah, dan layanan air. - Sebaran usaha menurut lokasi, skala, legalitas/NIB, status operasi, jumlah anggota atau pekerja, serta keterlibatan perempuan dan pemuda. - Program bantuan, pelatihan, hibah, peralatan, KUR, dan pembiayaan yang telah diterima, termasuk daftar penerima secara agregat. - Kendala utama usaha: bahan baku, kualitas, teknologi, izin, kemasan, pasar, transportasi, energi, air, sampah, pembukuan, dan modal. - Kebutuhan investasi, modal kerja, rencana ekspansi, kesiapan koperasi/UMKM sebagai agregator, penerima manfaat, dan responden monitoring berkala.

Sekretaris Deputi Bidang Pangan,
Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup,

\${ttd_pengirim}
Puspita Suryaningtyas